

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amsari, Feri, 2013, *Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2014, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam, 1988, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.
- Falaakh, Mohammad Fajrul, 2014, *Pertumbuhan dan Model Konstitusi Serta Perubahan UUD 1945 oleh Presiden, DPR, dan Mahkamah Konstitusi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Haryadi, Agus, 2006, *Bikameral bukan Federal*, Kelompok DPD di MPR RI, Jakarta.
- Huda, Ni'Matul 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI*, Nusa Media, Bandung.
- Ibrahim, Johnny, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang.
- Indrayana, Denny, 2007, *Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran*, Mizan, Bandung.
- Kaho, Josef Riwu, 2012, *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Center for Politics and Government (PolGov) Fisipol UGM, Yogyakarta.
- Kelsen, Hans, 2014, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara (terjemahan)*, Nusa Media, Bandung.
- Lubis, M. Solly, 1983, *Pergeseran Garis Politik dan Perundang-undangan Mengenai Pemerintah Daerah*, Alumni, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Nurcholis, Hanif, 2007, *Teori dan Praktik: Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta.

- Riyanto, Astim, 2006, *Negara Kesatuan: Konsep, Asas, dan Aktualisasinya*, Yapemdo, Bandung.
- Samudra, Syahda Guruh Langkah, 2000, *Menimbang Otonomi Vs Federal*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Latar belakang, proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku X: Perubahan UUD, Aturan Peralihan, dan Aturan Tambahan*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soehino, 2004, *Hukum Tata Negara Perkembangan Otonomi Daerah*, BPFE, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Soemantri, Sri, 2006, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi dalam Batang-Tubuh UUD 1945 (sebelum dan sesudah Perubahan UUD 1945)*, PT Alumni, Bandung.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati, 2005, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Strong, C.F., 1966, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk (terj.)*, Penerbit Nuansa dan Nusamedia, Bandung.
- Syahuri, Taufiqurrohman, 2004, *Hukum Konstitusi Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945-2002 Serta Perbandingannya Dengan Konstitusi Negara Lain di Dunia*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Wheare, K.C., 2011, *Konstitusi-konstitusi Modern (terj.)*, Nusamedia, Bandung.

## B. Jurnal

Mezak, Meray Hendrik, “Jenis, Metode, dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum”, *Law review*, Volume V, Nomor 3, Maret 2006.

Ni'matul Huda, “Berkayuh Diantara Bentuk Negara Kesatuan Dan Federal”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. I, No. 1, Februari 2009.

## C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839)

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493)

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633)

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657)

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

#### **D. Kamus**

Merriam Webster Incorporated, 1996, Merriam Webster's Dictionary of Law, Merriam-Webster inc., Massachusetts.

#### **E. Internet**

Jimly Asshidiqie, "makalah: Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi", [http://www.jimly.com/makalah/namafile/3/ideologi\\_pancasila\\_dan\\_konstitusi.doc](http://www.jimly.com/makalah/namafile/3/ideologi_pancasila_dan_konstitusi.doc), diakses tanggal 9 September 2016

Edward J. Erler, 2015, Artikel: Concurrent Powers, <http://www.claremont.org/js/ckeditor/ckfinder/userfiles/files/Encyclopedia-Amer-Const-Arts.pdf>, diakses pada tanggal 10 Desember 2016